

Beberapa Proyek Diduga Korupsi Ditangani Polda Kalimantan Utara



Sebanyak 12 proyek di Kaltara tersandung dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) saat ini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltara. Beberapa di antaranya telah selesai tahap penyelidikan¹, dan mulai akan dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan².

Kapolda Kaltara, Brigjen Pol Indrajit melalui, Dirkrimsus Polda Kaltara, Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra R menyampaikan dari 12 proyek yang ditangani saat ini merugikan negara hingga puluhan miliar. Guna menguatkan dugaan tersebut ia masih menunggu keterangan ahli konstruksi.

Kendala selama ini adalah pemeriksaan ahli, dikarenakan Kaltara saat ini belum memiliki ahli konstruksi, sehingga harus mendatangkan dari luar daerah. Dijadwalkan pekan kedua April dilaksanakan gelar perkara. Sehingga dari penyelidikan naik menjadi penyidikan.

Dijelaskan, 12 proyek yang diduga merugikan negara ini bersumber dari anggaran APBD³, APBN⁴, dan DAK⁵. Dan melihat hasil penyelidikan empat kasus yang bakal berlanjut. Lokasi proyek berada Malinau dan Kota Tarakan. Dimana, setiap daerah dua proyek. Kemudian, hasil pemeriksaan di lapangan dapat dipastikan terjadi tipikor. Dan orang-orang yang bakal bertanggungjawab juga sudah ditentukan.

¹ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Angka 5 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana)

² Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 2 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana)

³ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

⁴ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

⁵ Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

Informasi yang beredar, proyek yang sedang dalam bidikan Ditreskrimsus Polda Kaltara adalah pembangunan Pelabuhan Tangkayu I (SDF) yang menggunakan APBD Provinsi Kaltara dan pembangunan drainase di Karang Anyar Pantai, Tarakan menggunakan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara di Malinau salah satunya adalah proyek pembangunan jembatan menggunakan anggaran APBD Provinsi Kaltara

Menurutnya, proses penyelidikan tipikor membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sehingga, target awal Maret lalu dari 12 proyek bakal gelar perkara tertunda. Ia menegaskan tidak ingin terburu-buru menentukan status dari kasus yang ditangani.

Dirinya mengimbau kepada seluruh orang yakni kontraktor yang berani menerima tanggung jawab dari negara dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dimana ujungnya untuk kepentingan masyarakat, maka harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah mencoba untuk bekerja dengan asal-asalan, karena berdampak kepada masyarakat.

Sumber Berita:

- benuanta.co.id; Diduga Dikorupsi, 2 Proyek Di Tarakan Dibidik Polda Kaltara; Rabu 03 April 2019; dan
- kaltara.prokal.co; Empat Kasus Dugaan Korupsi Dilanjut; Kamis, 04 April 2019.

Catatan:

- Terdapat 7 jenis tindak pidana korupsi yaitu: (1) Merugikan Keuangan Negara; (2) Suap-Menyuap; (3) Penggelapan dalam Jabatan; (4) Pemerasan; (5) Perbuatan Curang; (6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan; (7) Gratifikasi
- Terkait tindak pidana korupsi, BPK dapat membantu para aparat penegak hukum dalam menghitung kerugian negara akibat kasus korupsi.
- BPK dapat pula melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.
- BPK memiliki unit khusus untuk melaksanakan pemeriksaan investigatif yaitu Auditorat Utama Investigasi